

Buletin *Bappebti*

Mengabdikan Dengan Integritas

24

**KOMPETENSI
SDM INDUSTRI
PBK HARUS SEJAJAR
INDUSTRI PASAR MODAL**

30

**WAJIB LAPOR
PEDAGANG
ASET KRIPTO**



SRG RUMPUT LAUT DARI HULU SAMPAI HILIR

EDISI 214

FEBRUARI 2020



PELAJARI DULU BARU BERTRANSAKSI

1

Pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan anda bertransaksi

2

Pelajari tata cara transaksi dan penyelesaian perselisihan

3

Pelajari kontrak berjangka komoditi yang diperdagangkan

4

Pelajari wakil pialang yang dapat izin dari BAPPEBTI

5

Pelajari dokumen-dokumen perjanjian

6

Pelajari risiko-risiko yang dihadapi

7

Pantang percaya dengan janji-janji keuntungan tinggi





Dari Redaksi

Pembaca **Buletin Bappebti** yang budiman,

Buletin Bappebti edisi kedua bulan Februari tahun 2020 mengangkat Utama tentang Sistem Resi Gudang Rumput Laut yang tidak hanya digarap di bagian hulu, tapi juga sampai ke hilir. Tema ini sangat menarik karena bisa menjadi alternatif memacu pertumbuhan dalam pengelolaan Sistem Resi Gudang (SRG). Tema ini juga sudah dikaji dan diteliti oleh Sutrisno Edi, staf ahli Menteri Perdagangan Bidang Pengamanan Pasar, yang kemudian dituangkannya dalam disertasi yang sudah dipertahankannya dalam ujian di Universitas IPB, Bogor. Dalam disertasi yang berjudul "Rancang Bangun Model Pembiayaan dan Strategi Pengembangan Rumput Laut Berbasis Sistem Resi Gudang (SRG)".

Redaksi juga menyoroti perkembangan harga komoditi yang sangat terpengaruh akibat merebaknya virus corona atau juga dikenal sebagai Covid-19. Masalah ini dibahas dalam rubrik Analisis. Kami juga menurunkan tulisan di rubrik Komoditi yang mengupas soal CPO yang menjadi andalan ekspor Indonesia. Dalam rubrik Pasar Lelang Komoditi pembaca bisa menyimak antisipasi pemerintah mengembangkan Sistem Pasar Lelang Komoditi Terpadu (SPLKT) dengan memanfaatkan teknologi informasi 4.0. Sementara pada rubrik Perdagangan Berjangka redaksi menurunkan tulisan tentang literasi PBK untuk mendorong perkembangan perdagangan berjangka yang lebih pesat.

Seperti biasa anda bisa menyimak juga perkembangan kegiatan Bappebti yang terangkum dalam Agenda Foto, serta berbagai informasi terkini, termasuk regulasi tentang kewajiban melapor secara reguler maupun sewaktu-waktu yang harus dilaksanakan oleh Pedagang Aset Kripto.

Kepada Pembaca yang ingin memberi masukan kepada Redaksi **Buletin Bappebti** silakan hubungi kami melalui email: humas.bappebti@kemendag.go.id atau kontak langsung 0811-1109-901, (021) 31924744, (021) 31923204.

Tim Redaksi

Penanggung Jawab: Tjahya Widayanti, **Redaktur:** Nusa Eka, **Penyunting/Editor:** Sentot Kamaruddin, Gunawan, Apriliyanto, **Fotografer:** Mutia Endang Novianti, Hendra Gunawan, **Sekretaris:** Deni Usep Sutisna, **Alamat Redaksi:** Gedung Bappebti Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat.

f Bappebti Kementerian Perdagangan

t @InfoBappebti

ig @Bappebti

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail : humas.bappebti@kemendag.go.id

DAFTAR ISI

BERITA UTAMA



REGULASI



PASAR BERJANGKA	10
PASAR LELANG	12
AGENDA FOTO	14
AKTUALITA	18
ENGLISH CORNER	22
INFO HARGA	28
ANALISIS	29

SRG Rumput Laut Dari Hulu Sampai Hilir

Sistem Resi Gudang (SRG) sudah berjalan cukup lama yaitu sejak tahun 2006 dengan berlakunya UU nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, yang kemudian diubah dengan UU nomor 9 tahun 2011. Artinya sistem ini sudah berjalan selama 14 tahun. Namun demikian tampaknya perlu dilakukan terobosan-terobosan agar SRG berjalan lebih baik, mengingat sebagian besar gudang yang sudah terbangun tidak berjalan sebagaimana diharapkan.

Sutriyono Edi, staf ahli Menteri Perdagangan bidang Pengamanan Pasar, melakukan studi dan menyarankan agar SRG, khususnya untuk komoditi rumput laut, supaya tidak hanya berlaku di hulu (petani produsen) tetapi juga perlu digarap di bagian hilir (industri). Studi tentang SRG Rumput Laut ini dituangkan oleh Sutriyono edi dalam disertasi program doktornya dengan judul "Rancang Bangun Model Pembiayaan dan Strategi Pengembangan Rumput Laut Berbasis Sistem Resi Gudang (SRG)"

Suasana gudang SRG milik PT Asia Sejahtera Mina Sidoarjo di Jawa Timur, Jumat (31/01) meriah dengan hadirnya Menteri Perdagangan **Agus Suparmanto**. Hari itu Mendag melepas ekspor perdana rumput laut PT Asia Sejahtera Mina ke Cina. Langkah ekspor ini merupakan salah satu terobosan dalam rangka pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) yang sudah lama dilaksanakan oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Kementerian Perdagangan.

Pada acara ekspor rumput laut itu Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menjelaskan Sistem Resi Gudang berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan membangun perdagangan dan industri yang berbasis sumber daya lokal. Menurut Mendag, mekanisme gudang SRG menawarkan terbukanya akses pasar di dalam dan luar negeri. Selama ini SRG lebih fokus kepada pasar dalam negeri. Dengan dilakukannya ekspor rumput laut ini membuktikan SRG bisa dimanfaatkan untuk menerobos pasar ekspor.



Agus Suparmanto

Menteri Perdagangan

Rumput laut yang diekspor dari gudang SRG PT Asia Sejahtera Mina adalah rumput jenis cottonii dengan volume sebanyak 50 ton atau senilai Rp1,14 miliar. *"Pelepasan ekspor rumput laut hari ini menunjukkan sistem resi gudang telah menjadi instrumen perdagangan yang dipercaya pasar nasional. Kemudahan dalam mengakses informasi terkait ketersediaan pasokan suplai, sebaran, mutu, dan nilai komoditas yang ditawarkan SRG memberikan kepercayaan dan keamanan yang lebih besar dalam transaksi perdagangan komoditi. Hal tersebut tentu dapat mendorong peningkatan daya saing produk Indonesia, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan transaksi ekspor komoditi,"* jelas Mendag.

Mendag juga menjelaskan bahwa kemudahan akses informasi tersebut juga berdampak pada adanya kemudahan dalam memperoleh pembiayaan komoditi yang kompetitif dan memungkinkan adanya manajemen risiko harga yang lebih efektif dan transparan. *"Kami optimistis SRG dapat mendorong pembangunan ekonomi. Seiring dengan perkembangan sistem informasi dan teknologi, SRG yang semula hanya digunakan sebagai instrumen tunda jual, saat ini juga dapat dimanfaatkan para pelaku usaha dalam mendukung kegiatan ekspor komoditi,"* lanjut Mendag. Pada kesempatan tersebut, PT Asia Sejahtera Mina juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) terkait pembiayaan perdagangan dengan pola *repurchasing* berbasis SRG. Terkait hal itu, Mendag mengharapkan kerja sama tersebut dapat berkelanjutan dan pada gilirannya dapat mendorong optimalisasi pemanfaatan SRG untuk mendorong kegiatan ekspor komoditi.

Sebagai catatan, berdasarkan data statistik Kementerian Perdagangan, nilai ekspor Indonesia untuk produk rumput laut dan produk turunannya pada periode 2014-2018 menunjukkan tren positif 0,81 persen. Pada Januari-November 2019, ekspor rumput laut tercatat sebesar USD298,73 juta atau naik 10,83 persen dari periode yang sama tahun 2018 sebesar USD 269,55 juta. Negara tujuan utama ekspor rumput laut Indonesia adalah Cina sebesar USD189,55 juta atau sekitar 65,07 persen dari total ekspor rumput laut Indonesia, disusul ekspor ke Amerika Serikat sebesar USD17,81 juta atau 6,11 persen, dan ke Korea Selatan sebesar USD13,13 juta atau 4,51 persen. Negara-negara pesaing Indonesia dalam memasok kebutuhan rumput laut ke Cina adalah Chile, Myanmar, Peru, Laos, Korea Selatan, Filipina, dan Timor Leste.

Ekspor rumput laut pada 2018 masih didominasi ekspor dalam bentuk produk mentah dengan total ekspor mencapai USD208,40 juta atau sebesar 71,54 persen dari total ekspor rumput laut secara keseluruhan. Sedangkan untuk ekspor rumput laut dalam bentuk olahan sebesar USD82,91 juta atau baru sekitar 28,46 persen. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), **Tjahya Widayanti**, menyatakan potensi pasar tersebut masih terbuka untuk terus ditingkatkan.

Sejauh ini ekspor komoditi rumput laut masih dominan dalam bentuk bahan baku. Ini merupakan peluang besar, yakni dengan mengembangkan ekspor rumput laut menjadi produk turunan yang akan memberikan nilai tambah yang lebih tinggi. Kepala Bappebti menambahkan gagasan untuk mengembangkan produk

turunan dalam SRG ini terus dilakukan guna mendukung tugas Kemendag untuk melakukan peningkatan ekspor nonmigas. *“Ke depan, kami berharap tidak hanya sebatas komoditas rumput laut, namun juga komoditas SRG lainnya yang berorientasi ekspor untuk dapat menduplikasi skema ini untuk meningkatkan transaksi ekspor komoditas Indonesia,”* ujar Kepala Bappebti.

Sistem Resi Gudang Multi Manfaat

Dalam berbagai kesempatan Bappebti terus mempromosikan Sistem Resi Gudang (SRG) kepada berbagai pihak. *“Pemerintah terus mendorong pemanfaatan SRG sebagai instrumen pengamanan persediaan untuk meningkatkan ekspor nonmigas. Para eksportir dapat memanfaatkan SRG dalam menjamin ketersediaan komoditi baik secara volume maupun terpenuhinya standar kualitas serta meminimalkan risiko penyimpanan,”* ujar Kepala Bappebti. Lebih lanjut Kepala Bappebti juga memaparkan bahwa keberadaan SRG berperan vital dalam menjaga ketersediaan pasokan (*secure of supply*). Selain itu, SRG juga menjaga stabilitas harga dalam membantu menaikkan posisi tawar petani dan produsen jika harga komoditi mengalami penurunan pada saat musim panen. *“SRG membantu pembiayaan bagi petani dengan subsidi bunga sebesar 6 persen per tahun serta membantu akses pasar bagi komoditi baik di dalam negeri maupun untuk keperluan ekspor,”* tambahnya.

Kepala Bappebti menjelaskan bahwa SRG merupakan instrumen tunda jual yang menguntungkan petani. Hal tersebut karena komoditi yang disimpan petani di SRG dapat dijual kembali pada saat harga sudah naik di pasaran. Selain sebagai instrumen tunda jual, layanan SRG bersama lembaga penjamin juga menyediakan akses pembiayaan komoditi. *“SRG juga dapat memberikan nilai tambah karena pada saat komoditi yang disimpan di SRG memenuhi kecukupan pasokan, standar kualitas, dan harga yang kompetitif, komoditi tersebut dapat dijual kepada para importir di luar negeri,”* tambah Kepala Bappebti.



Tjahya Widayanti

Kepala Bappebti



Foto: Bagian KIP

Sistem Resi Gudang atau SRG memang multi manfaat. Ia tidak hanya memberi manfaat bagi para petani tetapi juga eksportir maupun industri komoditi. Dengan menggunakan SRG para petani maupun pelaku bisnis bisa memperoleh modal kerja yang dibutuhkan tanpa harus pusing menyediakan kolateral atau agunan seperti tanah, rumah, atau aset lainnya, melainkan cukup dengan menjaminkan komoditi yang dimasukkan dalam gudang SRG. Tentunya, untuk itu komoditinya harus memenuhi persyaratan mutu yang telah ditentukan sebagaimana diatur oleh Bappebti, diantaranya soal kadar air, tingkat kekotoran dan sebagainya.

Garap SRG dari Hulu Hingga Hilir



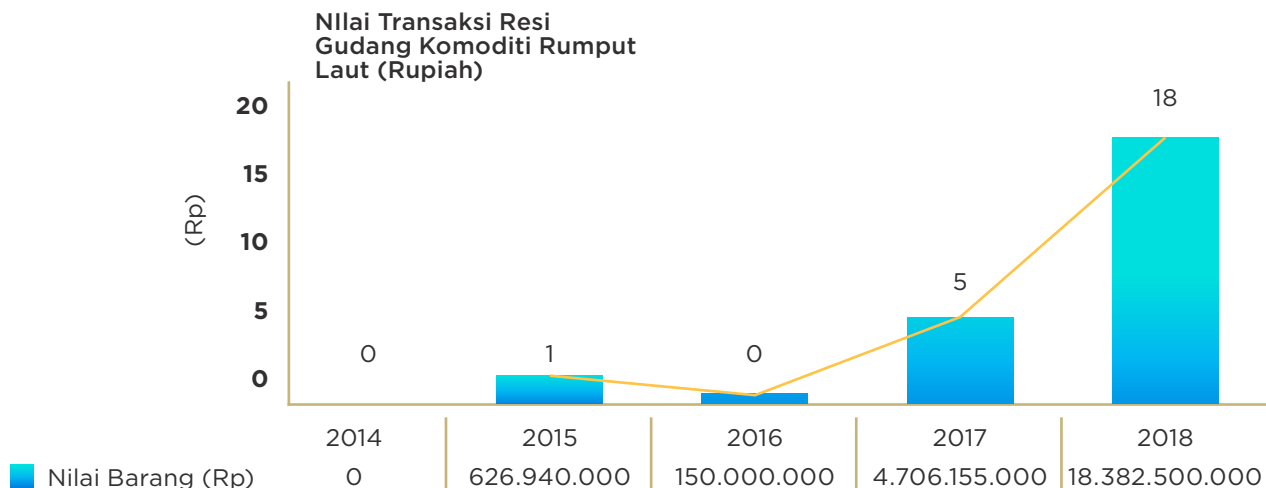
Sutriono Edi

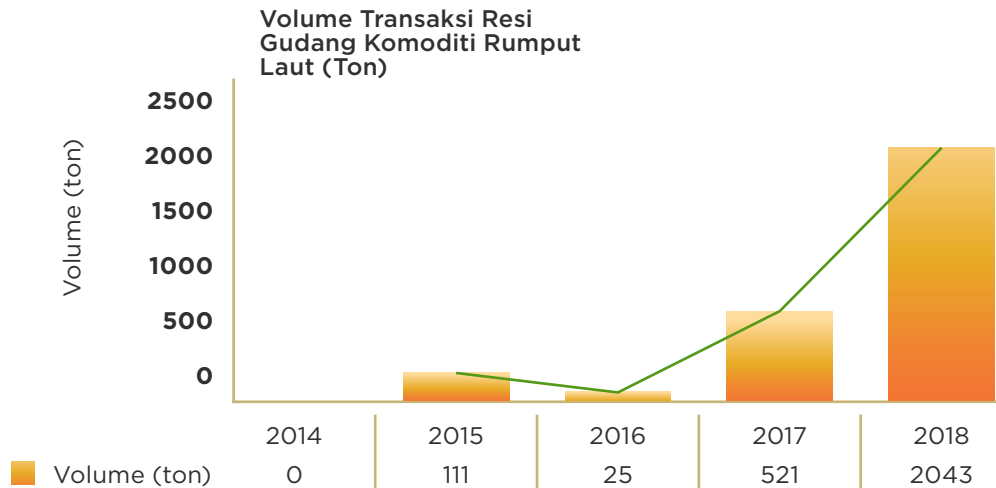
Staf Ahli Menteri
Perdagangan

SRG merupakan instrumen pembiayaan yang tidak hanya dimanfaatkan oleh para petani tetapi juga oleh para industri sudah cukup lama disinggung oleh Staf Ahli Menteri Perdagangan **Sutriono Edi**, yang sebelumnya juga pernah menjabat Kepala Bappebti. Sutriono Edi belakangan ini melakukan penelitian terhadap SRG Rumput Laut yang dinilai memiliki prospek yang sangat bagus untuk dikembangkan. Hasil penelitiannya kemudian dipertahankan dalam ujian doktornya di Universitas IPB, Bogor, akhir Januari 2020.

Menurut Sutriono, komoditi rumput laut memperlihatkan perkembangan yang sangat baik. Berdasarkan data Bappebti nilai transaksi SRG rumput laut menunjukkan peningkatan yang sangat berarti. Data yang ada pada tahun 2017 nilai transaksinya sebesar Rp4,7 milyar kemudian meningkat pesat tahun 2018 menjadi Rp18,38 milyar atau naik 4 kali lipat. Sementara volume transaksinya dari 521 ton pada tahun 2017 menjadi 2.043 ton pada tahun 2018.

Berdasarkan kecenderungan ekspor dan impor produk olahan rumput laut selama periode 1999-2004, diperkirakan pasar dunia produk olahan rumput laut meningkat sekitar 10 persen setiap tahunnya untuk produk karaginan *semirefined* (SRC), agar dan alginat untuk industri (*industrial grade*). Sedangkan alginat untuk makanan (*food grade*) meningkat 7,5 persen dan karaginan *refined* meningkat 5 persen per tahunnya.





Sumber: Bappebti 2019

Menurut Sutriono Edi, Sistem Resi Gudang sudah harus dilaksanakan tidak hanya di hulu yakni pada level petani, tetapi SRG juga harus mulai diterapkan di sisi hilir. Yang dimaksudkan adalah produk komoditi yang disimpan dalam gudang SRG tidak hanya dalam bentuk bahan baku semata, tetapi diolah terlebih dahulu menjadi produk turunan yang mempunyai nilai tambah. Pada rumput laut misalnya, komoditi yang disimpan tidak lagi berbentuk rumput laut kering, melainkan bahan yang sudah diolah misalnya menjadi bahan dasar industri agar-agar untuk jenis rumput laut *glacilaria*. Atau untuk jenis *cottonii* dijadikan karaginan, yakni bahan yang mengandung serat sangat tinggi (*dietary fiber*), atau sering juga dimanfaatkan sebagai media kultur bakteri atau kultur jaringan.

Untuk memperoleh produk turunan tersebut tentu diperlukan pengolahan dan hal ini yang melakukannya adalah sektor industri. Sebagaimana kita maklumi, biasanya industri tidak hanya mengandalkan modal dari kocek sendiri, melainkan lebih banyak memanfaatkan pinjaman dari pihak ketiga, biasanya dari perbankan. Di sisi lain seringkali industri menghadapi kendala terbatasnya agunan yang akan dijaminkan ke bank. Nah, dalam hal ini Sistem Resi Gudang bisa memainkan peranannya untuk menambah kekuatan modal industri. Sutriono memberi gambaran bahwa hal semacam ini sudah berjalan di negara-negara lain yang sudah lebih dahulu menerapkan SRG. *“Di Amerika atau Eropa, SRG merupakan instrumen bisnis biasa dan juga sudah*

biasa digunakan oleh industri atau pengusaha untuk memperoleh tambahan modal kerja dengan jaminan barang atau komoditi. Sementara di Indonesia memang pemanfaatan SRG masih terbatas di kalangan petani,” kata Sutriono Edi.

SRG untuk kalangan industri inilah yang ke depannya akan lebih dikembangkan oleh pemerintah. Namun ada sedikit perbedaan antara SRG untuk petani dan SRG untuk industri. Untuk petani bunga pinjaman SRG diberi subsidi oleh pemerintah dengan tingkat bunga yang besarnya hanya 6 persen per tahun. Bunga yang rendah ini dimaksudkan agar petani menjadi tertarik memanfaatkan fasilitas yang disediakan dalam SRG. Sementara untuk kalangan pengusaha/industri bunga pinjaman yang dikenakan adalah bunga komersial. *“Menurut saya dengan bunga komersial para pengusaha atau industri tetap akan tertarik memanfaatkan SRG. Ya, daripada mereka harus menyediakan agunan tambahan, kan lebih baik mereka agunkan komoditi yang sudah ada pada mereka,”* kata Sutriono. Apalagi bukan hanya bank yang bisa memberi pinjaman, tapi lembaga pembiayaan dan *fintech* juga nantinya akan bisa menerima Resi Gudang sebagai surat berharga yang bisa dijadikan agunan untuk pinjaman.

Untuk komoditi rumput laut, menurut sutriono, SRG dengan target industri bisa segera diberlakukan dengan sedikit saja mengubah peraturan yang ada, yakni dengan menambah kata-kata “rumput laut dan turunannya”. Selama ini SRG baru menjangkau rumput

laut dalam bentuk rumput laut kering yang kemudian disimpan di gudang SRG. Dengan tambahan kata “turunannya” maka produk olahan dari rumput kering seperti ATC (*Alkali Treated Cottoni*), SRC (*Semi Refined Carragenan*) dan RC (*Refined Carragenan*) serta *Carragenan Paper* (Karaginan kertas) bisa dijadikan agunan untuk memperoleh pinjaman dari bank maupun lembaga pembiayaan. Produk-produk tersebut merupakan turunan hasil pengolahan rumput laut jenis Cottonii yang merupakan bahan setengah jadi untuk produksi siap konsumsi (berdasarkan Perpres nomor 33 tahun 2019).

SRG yang akan berlaku bagi industri juga memberi dampak positif memotong rantai pemasaran yang lebih efisien, karena industri bisa langsung melakukan pembelian dari gudang SRG. Bahkan komoditi SRG juga bisa merupakan komoditi yang disimpan di gudang-gudang milik perusahaan industri itu sendiri. *“Tapi tentu dengan syarat pemilik gudangnya bukan merupakan pengelola gudang. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi konflik kepentingan,”* ujar Sutriono.

Sutriono Edi menjelaskan ke depannya bukan hanya rumput laut yang SRG-nya bisa digunakan sampai pada level hilir, tapi juga komoditi yang lainnya, seperti beras merah organik, lada, kopi, timah dan komoditi lainnya khususnya komoditi berorientasi ekspor. Ia menambahkan bahwa komoditi yang menarik bagi kalangan industri untuk dimasukkan dalam pengelolaan SRG adalah komoditi yang harganya tidak diatur atau ada intervensi dari pemerintah di dalamnya. Komoditi untuk tujuan ekspor menarik untuk dimasukkan dalam SRG karena pergerakan harganya mengikuti perkembangan pasar yang lebih terbuka. *“Kalangan industri dan pebisnis tentu kurang tertarik jika, misalnya, harga komoditinya sudah ditentukan dalam mekanisme HET (Harga Eceran Tertinggi) seperti beras. Sebab margin yang mereka peroleh menjadi sangat terbatas. Jadi untuk beras fluktuasi harganya tidak besar sehingga kurang menarik bagi pedagang maupun industri. Berbeda misalnya dengan rumput laut yang perubahan harganya bisa berbeda signifikan. Misalnya dari Rp17 ribu per kilo dalam bentuk rumput laut kering, setelah diolah menjadi Rp27 ribu per kg,”* kata Sutriono. Nah, dengan pergerakan harga seperti itu maka jika pengusaha harus menanggung bunga

komersial sebesar 12-13 persen per tahun atau sekitar 1 persen per bulan, hal itu tidak akan menjadi masalah. Sebab pengusaha tidak perlu mengeluarkan jaminan lagi, tetapi cukup dengan komoditi rumput laut olahan miliknya yang dijadikan jaminan atau kolateralnya.

Melihat peluang besar tersebut Sutriono berharap SRG rumput laut dikembangkan sampai sektor hilirnya. Sebab jika hanya pola seperti sekarang yang berjalan, maka SRG rumput laut tidak akan banyak mengalami kemajuan. Ia juga menyatakan pentingnya menghidupkan kembali gudang-gudang SRG yang kurang dikelola dengan baik, terutama gudang SRG yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, agar bisa memberi manfaat sebesar-besarnya. Dalam hal ini diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk membangkitkan kembali gairah pengelolaan SRG sebagaimana mestinya. *“Saya berharap melalui Sistem Resi Gudang (SRG), produktivitas dan daya saing komoditi kita dapat meningkat, tidak hanya di pasar domestik, namun lebih jauh di pasar dunia, sehingga SRG dapat mendorong perekonomian nasional,”* kata Sutriono Edi.

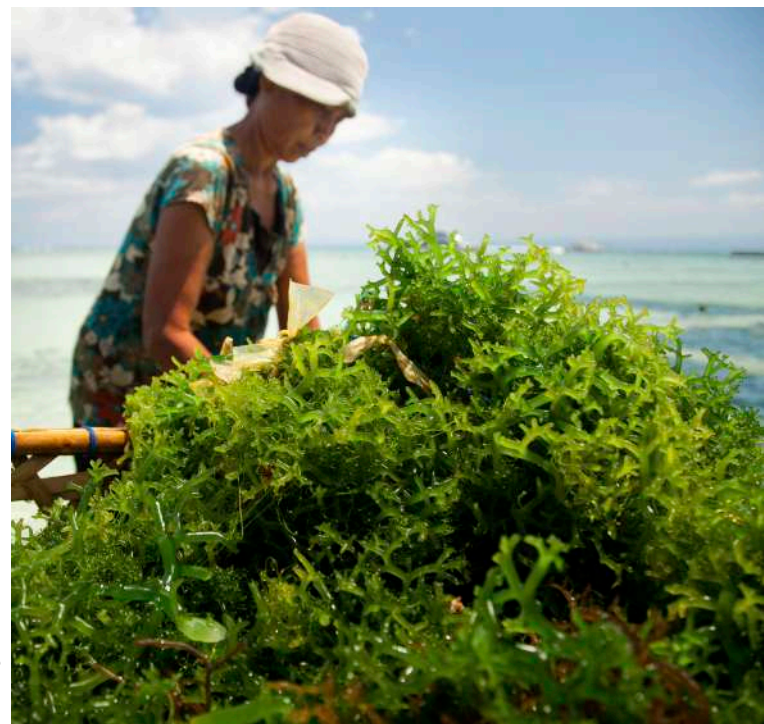


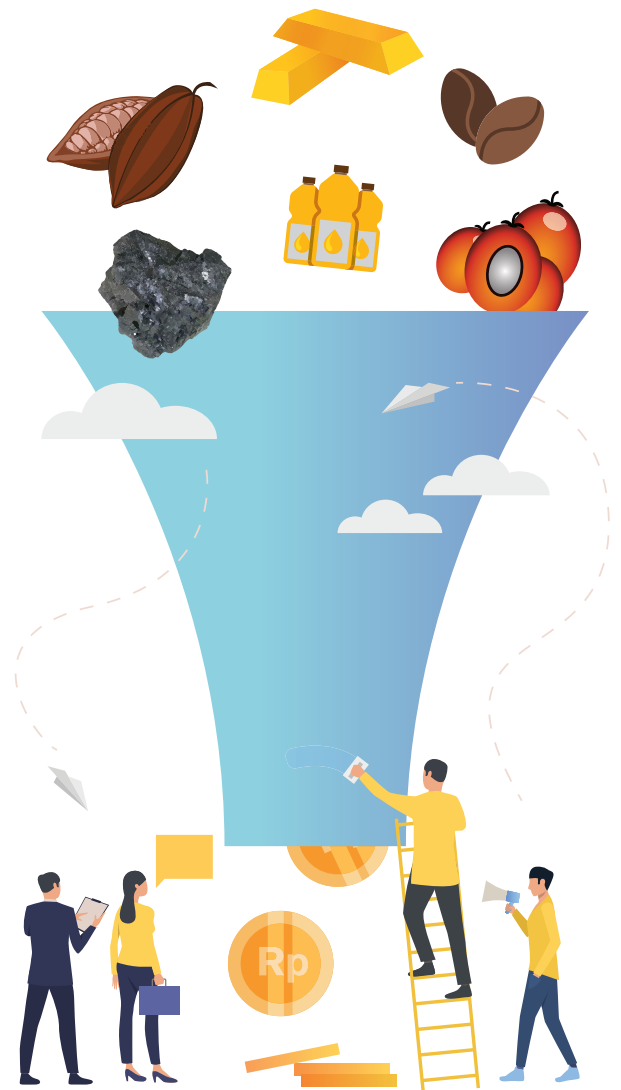
Foto: Bagian KIP

Literasi Untuk Tingkatkan Perdagangan Berjangka Komoditas

Perdagangan Berjangka Komoditas (PBK) di Indonesia diselenggarakan sejak tahun 2000. Dengan demikian hingga saat ini keberadaan bursa berjangka komoditas sudah sekitar 20 tahun. Selama kurun waktu itu perdagangan berjangka komoditas terus mengalami perkembangan. Namun harus diakui bahwa perkembangannya belum optimal sehingga masih perlu terus dipacu.

Mengapa perdagangan berjangka komoditas perlu terus dipacu agar semakin berkembang? Hal ini tidak lain karena perdagangan berjangka komoditas mempunyai manfaat sangat besar bagi perekonomian. Setidaknya ada tiga manfaat utama PBK yaitu pertama, sebagai sarana pengelolaan risiko (*risk management*) melalui kegiatan lindung nilai (*hedging*); kedua, sebagai sarana pembentukan harga (*price discovery*); dan ketiga, sebagai alternatif investasi (*investment enhancement*).

Bagi Indonesia sebagai negara agraris yang memproduksi berbagai komoditas pertanian dan perkebunan, keberadaan pasar berjangka komoditas lebih dirasakan arti pentingnya. Indonesia adalah produsen besar komoditas karet, kopi, lada, sawit dan berbagai produk pertanian dan perkebunan lainnya. Di samping itu Indonesia juga kaya akan komoditas non-pertanian yaitu produk pertambangan seperti timah, emas, batubara, nikel. Meskipun demikian pasar berjangka di Indonesia belum menjadi rujukan bagi penentuan harga komoditas di pasar global. Ambil salah satu contoh yaitu komoditas karet alam. Dengan produksi



sekitar 3,5 juta ton per tahun Indonesia merupakan produsen karet alam terbesar kedua di dunia di bawah Thailand yang memproduksi 4,8 juta ton per tahun. Namun sebagai produsen terbesar kedua Indonesia belum bisa menjadi penentu harga karet. Pasar internasional lebih sering menggunakan referensi harga dari Pasar Berjangka di Singapura dan Tokyo. Kondisi yang sama juga terjadi pada jenis komoditas lain seperti kelapa sawit (CPO) dan timah. Meskipun merupakan produsen CPO dan timah terbesar di dunia, Indonesia belum menjadi referensi harga kedua komoditas tersebut di pasar internasional.

Ini dikarenakan bursa berjangka di Indonesia belum cukup besar, karena belum banyak yang memanfaatkan bursa berjangka untuk melakukan transaksi perdagangan komoditasnya. Oleh sebab itu, perdagangan berjangka komoditas masih perlu terus dikenalkan kepada banyak kalangan agar mereka memahami kemudian tertarik berinvestasi dan bertransaksi melalui bursa berjangka komoditas.

Literasi PBK

Selama ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan, khususnya Bappebti, sudah cukup aktif melakukan kegiatan sosialisasi dan literasi kepada masyarakat tentang perdagangan berjangka komoditas. Demikian pula dengan BBJ (Bursa Berjangka Jakarta), BKDI (Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia) dan perusahaan-perusahaan pialang berjangka.

Kepala Bappebti Tjahya Widayanti belum lama ini mengungkapkan, PBK harus terus didorong agar tumbuh lebih besar dengan cara mengedukasi masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan literasi. *“Kegiatan ini bisa diimplementasikan dengan memperbanyak roadshow ke kampus-kampus agar kaum milenial dapat mengenal PBK sedini mungkin sebagai salah satu alternatif investasi yang menarik,”* ungkapnya seperti dilansir situs kemendag.go.id (19 November 2019).

Lebih jauh disampaikan Tjahya Widayanti, bahwa mulai tahun 2020 Bappebti akan mengenalkan PBK kepada

kaum muda, generasi milenial, agar tertarik berinvestasi pada jenis perdagangan ini. *“Upaya memperkenalkan investasi PBK kepada kaum milenial bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya masyarakat, khususnya kaum muda sehingga mereka tertarik berinvestasi. Jika kaum milenial ikut berpartisipasi dalam investasi, tentunya transaksi PBK akan semakin meningkat,”* jelas Tjahya.

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengajak para pelaku usaha dan calon investor untuk mengembangkan investasi di bidang perdagangan berjangka komoditas. Wamendag berpendapat bahwa sektor PBK di Indonesia harus semakin didorong agar bisa memberikan nilai tambah dan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Akan tetapi, Wamendag mengingatkan bahwa untuk berinvestasi di PBK masyarakat dan calon investor harus benar-benar memahami karakter bisnis di PBK.

“Saya mengimbau masyarakat dan calon investor untuk berhati-hati dan melakukan 7P sebelum masuk ke sektor PBK,” tegas Wamendag sebagaimana dilansir kemendag.go.id (5/12/2019).

Dijelaskan Wamendag yang dimaksud 7P yaitu pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan untuk bertransaksi, pelajari tata cara transaksi dan penyelesaian perselisihan, pelajari kontrak berjangka komoditi yang diperdagangkan, pantang percaya dengan janji-janji keuntungan yang tinggi, pelajari wakil pialang berjangka yang telah berizin dari Bappebti, pelajari dokumen-dokumen perjanjiannya, dan pelajari risiko-risiko yang dihadapi.

Apa yang disampaikan Wamendag sangat penting untuk diketahui dan dilakukan masyarakat, mengingat sampai sekarang masih sering terjadi penipuan dengan kedok melakukan investasi. Ini artinya, edukasi dan literasi tentang PBK perlu terus dilakukan kepada masyarakat. Apabila tingkat pengetahuan masyarakat tentang PBK sudah baik, dengan mengingat manfaat bisnis PBK yang cukup besar, bisa diharapkan investasi di bidang usaha ini akan meningkat pula.

Revolusi Industri 4.0 dan PLK



Dalam sepuluh tahun terakhir dunia dihadapkan pada tantangan besar terkait perubahan-perubahan di dunia industri akibat perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Istilah yang populer disebut-sebut oleh berbagai kalangan, baik kalangan pemerintah, akademisi, dan pengusaha yaitu Revolusi Industri 4.0 atau Revolusi Industri generasi ke-empat.

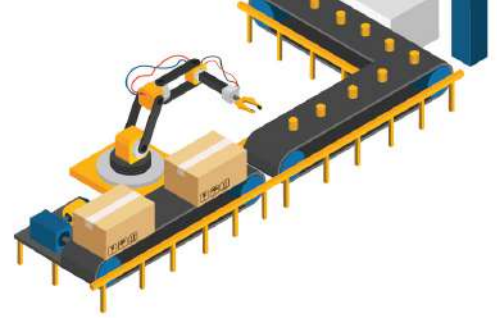
Revolusi Industri 4.0 merupakan tantangan karena perubahan-perubahan besar yang ditimbulkannya, tetapi sekaligus juga merupakan peluang emas untuk menggapai kesejahteraan atau meningkatkan perekonomian masyarakat dan negara. Revolusi Industri 4.0 adalah fenomena perubahan-perubahan dalam dunia industri yang dipicu oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yaitu internet.

Selama ini kita telah mengenal istilah Revolusi Industri 1.0, Revolusi Industri 2.0, Revolusi Industri 3.0 dan sekarang muncul Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 1.0 atau generasi pertama dipicu oleh penemuan mesin uap yang mampu menggantikan tenaga manusia dan hewan dalam industri. Revolusi Industri generasi ke-dua ditandai dengan produksi massal berkat pemanfaatan listrik. Revolusi Industri generasi ke-tiga terjadi dengan diterapkannya teknologi otomasi dalam kegiatan industri. Revolusi Industri 3.0 merupakan awal era digital yang mana penemuan-penemuan di bidang elektronik dipadukan dengan teknologi informasi. Pada era Revolusi Industri 4.0 penetrasi teknologi digital semakin dalam sehingga berdampak luas pada berbagai sektor kehidupan.

Ada beberapa inovasi teknologi pada era Industri 4.0 yang mempunyai dampak signifikan tidak hanya pada proses produksi tapi juga pada berbagai aspek terkait industri. Di antaranya yaitu apa yang disebut dengan *internet of things*, *artificial intelligence*, *human-machine interface*, *big data*, *robotic technology*, *machine learning*, serta *3D printing*.

Internet of things (IoT) adalah teknologi yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara mesin, perangkat, sensor, dan manusia melalui jaringan internet. IoT banyak digunakan dalam aplikasi-aplikasi internet di berbagai sektor, tidak hanya untuk produksi, tetapi juga distribusi, pemasaran, layanan konsumen serta publik. Demikian pula teknologi *artificial intelligence* (kecerdasan buatan), teknologi robotik dan sensor telah dimanfaatkan dunia industri untuk menciptakan efisiensi waktu, tenaga kerja, biaya dan peningkatan produktivitas. Industri 4.0 juga memanfaatkan big data atau kumpulan besar informasi yang bisa menjadi bahan analisis bagi kepentingan pengambilan keputusan bisnis dan industri.





Peta Jalan Industri 4.0

Terhadap fenomena Revolusi Industri 4.0 berbagai negara telah melakukan studi atau kajian-kajian untuk bisa memanfaatkannya sekaligus menghadapi dampak yang bisa ditimbulkannya. Tak terkecuali, pemerintah Indonesia juga telah mengantisipasi era industri 4.0. Pada awal April 2018 Presiden Jokowi telah meluncurkan peta jalan (*road map*) dan strategi Indonesia untuk menghadapi era industri 4.0. Peta jalan yang dinamakan "*Making Indonesia 4.0*" itu akan menjadi pedoman bagi arah pengembangan industri di Tanah Air.

Dijelaskan Presiden, bahwa pemerintah membutuhkan arahan untuk mengantisipasi revolusi industri yang saat ini sedang berlangsung dan mempunyai dampak sangat besar. Oleh sebab itu, pemerintah menjadikan peta jalan *Making Indonesia 4.0* sebagai salah satu agenda nasional. Presiden Jokowi menugaskan Kementerian Perindustrian sebagai koordinator program tersebut.

"Saya harap kementerian, lembaga lain, pemerintah daerah dan pelaku usaha mendukung penuh program ini sesuai tugas masing-masing demi kemajuan bangsa," ungkap Jokowi seperti dikutip *tempo.co* (4/4/2018).

Pasar Lelang Komoditas Terpadu

Mendukung kebijakan Presiden terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna mengantisipasi Revolusi Industri 4.0, Kementerian Perdagangan juga telah menyelenggarakan berbagai program. Terkait perdagangan komoditas Kementerian Perdagangan melalui Bappebti membangun Sistem Pasar Lelang Terpadu (SPLT) yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Melalui SPLT transaksi lelang komoditas bisa dilakukan secara *online*. Untuk itu Bappebti telah membuat aplikasi Pasar Lelang Terpadu yang dapat diunduh di *Google Play*. Sistem lelang secara *online* akan menciptakan efisiensi baik dari segi waktu, biaya dan tenaga. Selain itu SPLT juga bisa meningkatkan transparansi dalam proses lelang sehingga membangun kepercayaan masyarakat terhadap SPLT.

Menyangkut SPLT yang perlu terus dilakukan adalah pelatihan-pelatihan atau bimbingan bagi penyelenggara lelang maupun para (calon) peserta lelang agar memahami mekanisme dan teknis SPLT secara *online*. Bimbingan teknis tentang SPLT selama ini telah dijalankan Bappebti dengan harapan akan

semakin banyak pihak yang memahami dan mengikuti SPLT. Hal itu seperti yang diselenggarakan di Medan tanggal 11-14 Februari 2020. Pada kesempatan itu, Kepala Bappebti Tjahya Widayanti mengungkapkan, Bimtek PLK bertujuan mencetak sumber daya manusia yang menguasai SPLT sehingga sistem tersebut dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan PLK. Implementasi ini tidak hanya pada proses industri di hulu, tetapi juga sampai proses pemasaran di hilir untuk menghasilkan model perdagangan yang lebih efisien, praktis, serta aman dalam bertransaksi.

"Bimtek pasar lelang merupakan ujung tombak implementasi SPLT. Melalui bimtek ini, seluruh peserta diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dalam memajukan kegiatan PLK di masing-masing daerah. Peserta yang sudah menguasai SPLT juga diharapkan melakukan diseminasi kepada operator lainnya sehingga kegiatan PLK mampu meningkatkan kontribusi kegiatan perdagangan berjangka komoditi pada perekonomian nasional," ujar Tjahya Widayanti sebagaimana tertulis dalam rilis kemendag (13/2/2020).

Tjahya menjelaskan, PLK merupakan salah satu instrumen untuk menciptakan harga yang transparan sehingga dapat memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, penjual, dan pembeli. Berdirinya PLK bertujuan memperpendek mata rantai perdagangan, memberikan kepastian harga, membangun dan memperluas jaringan usaha, serta menjamin penyerahan komoditas sesuai kebutuhan.

Menurut Tjahya, Strategi pengembangan PLK saat ini diarahkan pada revitalisasi pasar lelang yang mengedepankan kemandirian dan profesionalisme. Dengan adanya revitalisasi pasar lelang diharapkan akan dibentuk lembaga penyelenggara pasar lelang yang mampu melihat peluang bisnis dalam mengembangkan pasar lelang yang mendukung pemasaran komoditas di Indonesia. *"Termasuk potensi PLK untuk mendukung ekspor komoditas pada produk yang disimpan di gudang sistem resi gudang (SRG) dan diperdagangkan melalui transaksi multilateral di bursa berjangka komoditi,"* tuturnya. Melalui SPLT diharapkan industri berjangka komoditas akan semakin berkembang dan siap menghadapi era industri 4.0.

Temu Teknis SRG dan Ujian WPB

.....

Kepala Bappebti Tjahya Widayanti membuka sekaligus memimpin Pertemuan Teknis Sistem Resi Gudang (SRG) yang berlangsung di Malang, Jawa Timur, Kamis (6/2). Kegiatan dilakukan untuk mengkoordinasikan program kerja dan kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam mendukung akselerasi pelaksanaan SRG.

Kepala Bappebti meminta komitmen dari masing-masing pihak (Pemda) untuk menyiapkan program kerja terkait pengembangan SRG. Bappebti juga meminta untuk melakukan identifikasi/seleksi penetapan calon pengelola gudang untuk Gudang SRG di daerah yang belum ada pengelola gudangnya. Selain itu Bappebti juga akan berkomitmen dalam penyiapan dan pengembangan SRG di daerah melalui program kerja yang diharapkan dapat bersinergi dengan program kerja daerah, seperti program penyiapan SDM pengelola gudang dan program literasi SRG bagi aparatur dan pelaku usaha di daerah. Bappebti akan terus mendorong pihak perbankan di daerah untuk secara aktif berpartisipasi dalam pembiayaan SRG.

Kegiatan ini diikuti perwakilan dari dinas yang membidangi perdagangan dari 9 kabupaten penerima bantuan Gudang SRG di wilayah Jawa Timur, yaitu Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Jember, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Jombang, serta beberapa *stakeholders* terkait seperti Bank Indonesia, BRI, BNI, Bank Jatim, Bank BJB dan PT Kliring Berjangka Indonesia.





Foto: Bagian KIP

Pada kunjungan di Malang ini, Kepala Bappebti Tjahya Widayanti juga membuka cara Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka (WPB) angkatan pertama tahun 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 6-7 Februari 2020.

Dalam arahnya Kepala Bappebti menyampaikan Bappebti bersama Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka dan Aspebtindo akan terus meningkatkan kualitas Profesi Wakil Pialang Berjangka dengan melakukan pembinaan, baik kepada para calon Wakil Pialang atau kepada Wakil Pialang yang telah mendapat izin. Pembinaan dilakukan dalam bentuk pelatihan teknis, Program Pelatihan Peningkatan Profesi Wakil Pialang Berjangka, sosialisasi serta edukasi.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Sahudi menyampaikan laporan penyelenggaraan bahwa kegiatan yang berjalan selama 2 hari ini diikuti peserta dari berbagai daerah serta dari 17 (tujuh belas) perusahaan Pialang Berjangka. Dari 65 orang peserta ujian tertulis pada tahap pertama, peserta yang lolos ujian tahap wawancara sebanyak 37 orang.

Acara Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka (WPB) ini juga dihadiri oleh Sekretaris Bappebti, Nusa Eka, Tenaga Ahli Perdagangan Berjangka Komoditi Pantas Lumban Batu, Ketua Aspebtindo, Dirut PT KBI, perwakilan PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia dan PT. Bursa Berjangka Jakarta.

Implementasikan GCG Jaga Kepercayaan Masyarakat

Foto: Bagian KIP



Kepala Bappebti Tjahya Widayanti hadir dan turut meresmikan Ruang Kantor dan Website PT. KBI (Kliring Berjangka Indonesia) serta Pengenalan Sistem JaFETS NOW PT. BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) di Jakarta (29/1).

Dalam sambutannya Kepala Bappebti menyampaikan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, PT. KBI harus senantiasa mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) secara konsisten dan berkelanjutan, untuk menjaga kepercayaan para pelaku usaha dan masyarakat. Oleh karena itu PT. KBI harus menyajikan informasi yang senantiasa up-to-date dalam website-nya.

Acara dilanjutkan dengan konferensi pers mengenai PPh Final di Perdagangan Berjangka Komoditi dengan narasumber Kepala Bappebti, Dirut PT KBI dan Dirut PT BBJ.

Program Kerja Bappebti Tahun 2020

Kepala Bappebti, Tjahya Widayanti, memberikan sambutan dan pengarahan dalam acara Konsinyering Penyusunan Program Kerja Bappebti Tahun 2020 di Jakarta (15/1). Pada kesempatan ini masing-masing Kepala Biro di lingkungan Bappebti terkait program kegiatan masing-masing Biro.

Hadir pula dalam kesempatan ini Inspektur I Kemendag, Fajarini Puntodewi dan Perwakilan dari Biro Perencanaan Kemendag serta perwakilan dari Kementerian Keuangan.

Foto: Bagian KIP





Foto: Bagian KIP

Kunjungan Kerja ke Gudang SRG di Kalimantan

Kepala Bappebti Tjahya Widayanti didampingi Sekretaris Bappebti dan Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK melakukan rangkaian kunjungan kerja ke Gudang SRG di Kalimantan, yakni Kab. Barito Kuala, Kab. Tapin dan Kab. Kapuas. Kunjungan berlangsung tanggal 22-24 Januari 2020.

Dalam kunjungan ke Gudang SRG Kab. Tapin Tim Bappebti berdiskusi dengan pengelola gudang dan juga para petani membahas kendala dan upaya penyelesaian dalam pelaksanaan SRG di Kab. Tapin. Diskusi juga dilakukan saat kunjungan di Gudang SRG Kab. Barito Kuala (Anjir Muara). Sementara dalam kunjungan di Gudang SRG Kab. Kapuas Bappebti memberikan bantuan fasilitas penunjang Gudang SRG berupa Rice Milling Unit dan alat angkut. Pada kesempatan ini Kepala Bappebti juga memberikan secara langsung Sertifikat Persetujuan Gudang SRG Kab. Kapuas dan Sertifikat Persetujuan Pengelola Gudang kepada KUD Terusan Jaya.



Kepala Bappebti membuka sekaligus memimpin Pertemuan Kelompok Kerja Sistem Resi Gudang (SRG) terkait akselerasi pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) di Jakarta (27/1). Kepala Bappebti menyampaikan bahwa pada akhir 2019 Bappebti telah melakukan koordinasi dan sinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta Kemendesa PDTT (Kementerian Pedesaan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) dengan koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian. Bappebti menginisiasi akselerasi implementasi SRG serta akan membantu Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyiapkan pelaksanaan SRG di 10 daerah, yakni Kabupaten Purworejo, Demak, Probolinggo, Ciamis, Kuningan, Lebak, Bolaang Mongondow, Wakatobi, Sumenep dan Dompu. Hadir dalam acara ini pejabat dari Kementerian Perdagangan, perwakilan Kemenko Perekonomian; Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemendesa PDTT, Bank Indonesia (BI) dan Lembaga terkait lainnya.

Pertemuan Kelompok Kerja SRG



Foto: Bagian KIP



Indonesia Dorong Penyelesaian Krisis Harga Kopi Global

Setelah sukses terpilih sebagai Ketua Dewan Organisasi Kopi Internasional (International Coffee Organization/ICO) periode 2019/2020, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional (Dirjen PPI) Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo memulai misi pertama berkunjung ke London, Inggris pada 22–24 Februari 2020. Lawatan yang didampingi Pejabat KBRI London itu dilakukan untuk berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan kopi di kantor ICO.

Di sana Dirjen PPI bertemu dengan Direktur Eksekutif DE ICO, Jose Sette, untuk membahas agenda Pertemuan Dewan Kopi Internasional ke-126 yang bakal digelar pada 27 April–1 Mei 2020 di London.

Sebagai salah satu negara produsen kopi terbesar di dunia, DE ICO mengapresiasi, mendukung, dan mengharapkan peran keketuaan Indonesia dalam ICO.

“ICO penting bagi Indonesia dan dalam pertemuan dewan yang akan dilaksanakan dua kali pada tahun ini, kami ingin memastikan relevansi ICO dalam mengatasi rendahnya harga dan keberlanjutan kopi untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi produsen (petani) dan konsumen kopi global,” ungkap Iman.

Selain itu, dalam rangka mengakomodasi isu-isu terkini kopi global, juga akan dibahas mengenai

revisi International Coffee Agreement (yang akan habis masa berlakunya pada 2 Februari 2021) di antaranya untuk lebih mengoptimalkan peran dan kemitraan dengan sektor swasta.

Krisis harga kopi global yang terus terjadi selama beberapa tahun terakhir menurunkan pendapatan petani karena tidak cukup memenuhi biaya produksi yang tinggi. Situasi ini diperparah dengan kondisi perubahan iklim yang juga mengganggu produksi.

“Sebagai Ketua Dewan, kami akan menegaskan bahwa kopi merupakan salah satu komoditas pertanian yang menggerakkan roda ekonomi berbagai negara di dunia termasuk Indonesia, melalui penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Hal ini sangat terkait dengan pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan yang harus ditopang secara berimbang oleh tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan,” kata Iman.

Untuk mendukung tingginya konsumsi dan permintaan akan produk kopi Indonesia, produksi dan produktivitas, serta mutu dan nilai tambah kopi perlu terus ditingkatkan. Salah satu strategi mendukung sektor pertanian kopi dilakukan Indonesia melalui keanggotaannya di ICO, yaitu dengan ikut terlibat dan mendorong upaya mengatasi rendahnya harga dan produksi kopi yang berkelanjutan melalui pelaksanaan agenda Dewan dan Gugus Tugas ICO.



Kemendag Gandeng Pemkab Pemalang Arahkan BUMDEs Jadi Pengelola Gudang SRG

Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang bersinergi melakukan pendampingan bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) Pemalang Maju Bersama untuk menjadi pengelola gudang sistem resi gudang (SRG) di Pemalang, Jawa Tengah.

Sinergitersebut bertujuan mempercepat pertumbuhan perekonomian di pedesaan melalui gudang SRG. Saat ini, Pemkab Pemalang tengah memfasilitasi pembuatan akta notaris untuk BUMDes agar berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) sehingga SRG Pemalang dapat beroperasi maksimal.

Lembaga ini paling paham kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki desa sehingga sangat cocok menjadi pengelola gudang SRG.

“SRG berperan penting mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah, khususnya di wilayah pedesaan. Perubahan sistem perekonomian di desa yang kini semakin maju, cepat, dan dinamis tentunya perlu didukung oleh koperasi atau badan usaha sebagai mesin penggerak perekonomian di desa. Salah satunya



berupa BUMDes yang bersinergi dalam pengelolaan gudang SRG,” ujar Kepala Badan Pengawas Berjangka Komoditi, Tjahya Widayanti saat berkunjung ke Pemalang, belum lama berselang.

Menurut Tjahya, SRG memberikan banyak sekali manfaat, yaitu sebagai instrumen stabilisasi harga pada saat panen, mengamankan pasokan komoditas pertanian sebelum musim panen raya, serta menjadi gudang penyimpanan sebelum diekspor ke luar negeri.

Pada 2015 dan 2016, pelaksanaan gudang SRG di Pemalang dikelola PT Bhanda Ghara Rekso dan didampingi Koperasi Tani Makmur Sejahtera.

Pengelola gudang SRG ini telah menerbitkan 10 resi gudang untuk komoditas gabah dengan volume sebanyak 129,84 ton atau senilai Rp743 miliar. Untuk menjaga keberlangsungan pengelola gudang SRG, Kementerian Perdagangan bersama Pemda memberikan kemudahan berupa insentif keringanan biaya sewa gudang SRG.

Insentif ini diharapkan dapat terus mendorong koperasi atau BUMDes agar tetap menjadi pengelola Gudang SRG setelah masa pendampingan berakhir.



Malaysia Batal Gugat Eropa Soal CPO

Kabar buruk datang dari Malaysia. Negeri jiran terdekat ini batal mengajukan gugatan lewat Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait pembatasan biofuel berbasis minyak kelapa sawit (CPO) yang dilakukan Uni Eropa.

Padahal sejak Juli 2019, Malaysia getol mengatakan akan mengirimkan gugatan pada November tahun lalu.

Bahkan, Malaysia umbar janji bakal berusaha meyakinkan Eropa *me-review* aturan tersebut pada pertemuan yang diselenggarakan 2021 mendatang.

Langkah ini tentunya berbeda dengan Indonesia yang sudah mengajukan gugatan terlebih dahulu pada Desember 2019.

“Kami memang pernah memiliki niat (menggugat), tetapi kami memikirkannya sebelum bertemu dengan Eropa. Kami tidak seharusnya mengajukan gugatan dengan tergesa-gesa. Ini yang kami sampaikan ke Indonesia juga,” kata Menteri Industri Primer Malaysia Teresa Kok, seperti yang diberitakan oleh *Reuters*, Kamis (13/2/2020).

Teresa yang bertemu dengan Komisioner Energi Uni Eropa pada Rabu (12/2/2020), juga mengatakan minyak sawit Malaysia jauh lebih hijau dari pada klaim para pengkritiknya.

Pemerintah Malaysia menegaskan jika luasan hutan di negara tersebut tetap berada di atas 50 persen. Sementara hasil minyak kelapa sawit per hektar jauh melebihi minyak lain, seperti dari lobak atau kedelai.

Konsumsi minyak sawit oleh Uni Eropa dalam makanan terus menurun, tetapi penggunaannya sebagai bahan bakar nabati meningkat. Tahun lalu, blok itu mengkonsumsi lebih dari 7 juta ton, dengan sekitar 65 persen energi.

Indonesia dan Malaysia, yang memproduksi lebih dari 85 persen minyak sawit dunia, dan Uni Eropa berencana untuk membahas masalah ini bersama-sama. Teresa mengatakan, dia ingin diskusi itu dipercepat.

Sebelumnya, Komisi Eropa menuding kelapa sawit sebagai produk deforestasi yang berlebihan. Eropa juga mengklaim penggundulan hutan sebagai pengabaian pada target energi terbarukan.

Ini membuat diesel berbasis minyak sawit tidak bakal dianggap sebagai energi terbarukan. Bahkan penggunaannya dalam bahan bakar transportasi secara efektif akan dihapus pada tahun 2024.



Perluas Implementasi Gudang SRG, Kemendag Berikan Stimulus Dana Alokasi Khusus untuk Daerah

Kementerian Perdagangan memperluas implementasi gudang sistem resi gudang (SRG) dengan memberikan stimulus dana alokasi khusus kepada daerah. Untuk merealisasikannya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kemendag mengadakan forum konsultasi teknis (FKT) terkait dana alokasi khusus tahun anggaran (DAK-TA) 2020 pada 20-22 Februari 2020 di Bogor, Jawa Barat.

FKT yang dihadiri sekitar 50 orang peserta terdiri dari perwakilan dinas perdagangan di daerah serta konsultan perencanaan pembangunan gudang dan sarana penunjangnya pada kabupaten penerima DAK-TA 2020.

Tujuannya agar pembangunan gudang dan sarana penunjang dalam kerangka SRG dapat berjalan sesuai dengan ketentuan berlaku yaitu Perpres No. 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK-TA 2020 dan Permendag tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan Gudang dan Penyediaan Sarana Penunjang Gudang SRG.

"Melalui FKT diharapkan para perwakilan daerah penerima DAK TA 2020 dapat memanfaatkan forum ini dengan maksimal untuk selanjutnya mendiskusikan mengenai keseluruhan aspek maupun kendala dalam pelaksanaan pembangunan gudang SRG dan pembangunan sarana penunjang. Tujuan lainnya membahas implementasi dan meminimalkan kendala yang sering timbul pada tahun sebelumnya," ujar Kepala Bappebti Tjahya Widayanti.

Sekretaris Bappebti Nusa Eka menambahkan, pada 2020, Bappebti telah menetapkan 14 kabupaten/kota sebagai daerah penerima DAK TA 2020 yaitu Aceh Tengah, Bangka Tengah, Pesisir Barat, Sumedang, Cianjur, Grobogan, Wonogiri, Kebumen, Pekalongan, Luwu Timur, Luwu Utara, Bangli, Sambas, dan Kapuas.

"Tahun ini Bappebti akan fokus pada pembangunan gudang baru di dua kabupaten yaitu Bangka Tengah untuk gudang lada dan Bangli untuk gudang kopi. Sedangkan untuk kabupaten lainnya alokasi DAK TA 2020 dipergunakan untuk membangun sarana penunjang seperti mesin penggiling padi (rice milling unit/ RMU), rumah RMU, suton & roasting, rumah suton & roasting, pengering, sarana angkut, garasi, karoseri, dan penyortir warna."

Pelaksanaan DAK TA 2020 diharapkan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peruntukannya dan bermanfaat bagi rakyat," tutup Nusa Eka.



Pengendalian Virus Corona Buat Minyak Kembali Mendidih

Harga minyak mentah naik di tengah optimisme pasar terhadap kemajuan pengendalian wabah virus corona.

Mengutip *Bloomberg*, harga minyak jenis *West Texas Intermediate* (WTI) kontrak pengiriman Maret 2020 di Nymex menguat 1,20 persen menjadi 51,36 dolar AS per barel.

Setali tiga uang, harga minyak Brent kontrak pengiriman April 2020 di ICE Futures juga melesat 0,60 persen menjadi 55,63 dolar AS per barel.

Sentimen bagi minyak datang setelah muncul peluang wabah virus corona dapat dikendalikan. Hal ini membuat permintaan bahan bakar di Negeri Tirai Bambu kembali *rebound*.



Di sisi lain, OPEC dan produsen sekutunya, atau sering disebut OPEC+ bertemu awal Februari ini. Dalam pertemuan tersebut didiskusikan tentang rencana pengurangan produksi lebih lanjut demi mendukung kenaikan harga.

"Mengingat tekanan yang telah terjadi di pasar komoditas minyak belakangan, sentimen OPEC dapat menjadi batuan untuk reli," kata ING Economics seperti dikutip Reuters.

OPEC+ memang sudah mempertimbangkan penurunan produksi lebih dalam, yakni sekitar 500.000 barel per hari. Jika hal ini terjadi, maka produksi minyak anggota OPEC+ yang sebelumnya dipangkas 1,7 juta barel per hari menjadi 2,2 juta barel per hari.

OMNIBUS LAW

UU Perdagangan dan Metrologi Legal Direvisi Seiring Omnibus Law



Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dukungan itu dilakukan melalui penyesuaian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang meliputi klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha dan klaster Pengenaan Sanksi dari total 11 klaster pada Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

"Pemangkasan perizinan berusaha dan penyederhanaan prosedur perizinan sudah saatnya dilakukan. Sudah saatnya pula pelaku usaha memproses perizinan sesuai indikasi risiko kegiatan usahanya," kata Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto di Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Regulasi berusaha berbasis risiko, lanjut Mendag, memberikan perizinan berusaha dan pengawasan berdasarkan tingkat risiko usaha dan/atau kegiatan. Regulasi tersebut mengarah pada penentuan tingkat risiko dan jenis perizinan yang diperlukan.

Mendag juga menegaskan penataan kembali kewenangan sektor perdagangan tersebut dapat memberikan penyederhanaan perizinan, prosedur, dan kemudahan dalam proses perizinan, serta memberikan kepastian hukum dalam berusaha.

Sedangkan pengaturan kembali pengenaan sanksi, kata dia, dapat memberikan kenyamanan dalam berusaha dengan tetap memperhatikan aspek tanggung jawab pelaku usaha.

Selain itu RUU Cipta Karya, lanjut Mendag, bertujuan untuk mengubah kewenangan mengatasi konflik peraturan perundang-undangan, menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi, serta mempermudah pengurusan perizinan.

RUU Ciptaker terdiri dari sebelas klaster yaitu penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, kemudahan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi.

Lobbies the Relief of American GSP

The Minister of Trade Agus Suparmanto flew to Washington DC, United States, to discuss the settlement of negotiations on the relief of import duty or Generalized System of Preferences (GSP) from the US to Indonesia. In Washington, Agus met with the United States Trade Representative (USTR) Robert Lighthizer to discuss several items the two countries had not agreed on Thursday, February 13, 2020.

"This GSP is advantageous so that Indonesian export products will again get a general preferential tariff incentive facility," he said.

With the completion of the GSP negotiations, it is expected to be able to boost exports of Indonesian products to the US. On the other hand, for the US, granting GSP is also beneficial because as an importer, the country will get cheaper quality goods.

Foto: Bagian KIP



Several GSP products will be discussed such as plywood, onions, forest honey, syrup, sugar, and special processed rattan materials. There is also a special discussion related to the GSP for horticultural products, localization and reinsurance data which is still a record for the US. "So it will be discussed later to be finalized. We are still discussing these three items per item," he said.

According to Agus, the completion of the GSP has been delayed since the promised completion at the end of 2019 and due to many things, including the need for increased coordination between ministries/institutions. "Here we will harmonize everything," he said.

The United States evaluates GSP in the context of a country review because the country is still experiencing a trade deficit in goods with Indonesia of USD8.4 billion throughout 2019.

Indonesian Trade Mission to Australia

The Indonesia-Australia Business Forum took place in Sydney, 11 February 2020. The business forum was chaired by the Director General of National Export Development, Dody Edward and the Director General of International Trade Negotiations, Iman Pambagyo representing the Minister of Trade. At this trade mission, 10 Indonesian companies actively participated in various sectors, namely wood, furniture, home decoration, crafts, food and beverages, coffee, fertilizer, and e-commerce.

In addition, after the business forum, a business matching agreement was held that brought together Indonesian and Australian business people. The Director General of National Export Development, Dody Edward also

Foto: Bagian KIP



witnessed this business matching. "This activity generates a potential value of a B-to-B transaction of USD 2.4 million for food products and cooking spices, coffee, fishery products, furniture, and wood products," Dody explained.

Dody hopes that this transaction will continue to grow along with the achievement of trade agreements that are currently still in the process of business to business negotiations.

Visit the Tempe Tofu factory

In a series of trade missions to Australia, on February 12, 2020, the Director General of National Export Development along with Indonesian business people also had the opportunity to visit the tempeh tofu industry that was successfully developed by the Indonesian diaspora in Sydney, namely Nutrisoy. Tofu and tempeh products have considerable potential in the Australian market since most Australians are starting to realize healthy living and reduce meat consumption.



Nutrisoy's market share is currently 90 percent marketed in Australia. While 10 percent is for exports to New Zealand, New Caledonia, Singapore and the United Arab Emirates. Nutrisoy produces Indonesian special food (tofu and tempeh) which is very popular with the people of Australia. "We hope that Nutrisoy can carry out promotions to introduce Indonesian products more broadly, especially in restaurants and supermarkets so that the Australian public knows about Indonesian products," said Dody.

In addition to Nutrisoy, the Director General of National Export Development and his entourage also visited Indonesian importers engaged in timber and building materials, namely Innovative Timber Ideas (ITI).



Foto: Bagian KIP

Trade Minister Discusses Trade Barriers to Increase Exports to India

Minister of Trade Agus Suparmanto negotiated trade barriers related to the latest import regulations for palm oil, areca nut and jewelry products released by India. The discussion took place warmly at a bilateral meeting between Minister of Trade Agus and the Minister of Railways, Trade and Industry of India Piyush Goyal in New Delhi, India, Thursday (20/2).

On that occasion, the Minister of Trade Agus raised Indonesia's interests regarding the latest policy of the Indian Ministry of Trade and Industry related to the import regulation for refined palm oil for HS code 151190. The regulation requires licensed importers before importing refined palm oil products. The obligation to have an import license is certainly burdensome for Indonesian business people. Because previously not regulated by the Indian government.



Foto: Bagian KIP

The Director-General of International Trade Negotiations, Iman Pambagyo added, although the regulation mentions restrictions only on HS 151190 refined palm oil products, as emphasized by the Minister of Trade Agus, the policy also affected the emergence of trade barriers for the export of HS 151110 crude palm oil (CPO) products to India. Even further, it can also affect oil palm farmers. "Until now, Indonesia is still recorded as the largest supplier of CPO products for India," said Iman.

Kompetensi SDM Industri PBK Harus Sejajar Industri Pasar Modal

Industri perdagangan berjangka komoditi (PBK) diharapkan mampu berperan strategis sebagai sarana lindung nilai (*hedging*) serta sarana pembentukan harga (*price discovery*), dan alternatif investasi yang menarik. Berbeda dengan industri pasar modal yang “*slowly but sure*”, industri PBK dinilai memiliki konsep “*high risk high return*” atau mampu mendatangkan keuntungan besar namun risiko investasinya cukup tinggi.

Kendati demikian, minat masyarakat untuk terlibat dalam PBK menunjukkan tren lonjakan volume transaksi kontrak multilateral dan kontrak Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) yang cukup bagus baik di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) maupun Bursa Berjangka Derivatif Indonesia (BKDI) dalam beberapa tahun terakhir.

Data Bappebti menunjukkan, transaksi BBJ dan BKDI pada 2018 meningkat sampai 25,20 persen atau menjadi 8.821.762 lot. Adapun volume transaksi kontrak berjangka pada Januari sampai dengan Agustus 2019 tercatat sebesar 7.043.116 Lot. Jumlah itu terus meningkat lagi seiring masifnya upaya sosialisasi dan edukasi terkait pilihan investasi PBK.

Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Aspebtindo), **Fridericus Wishnubroto** menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya memberikan pemahaman dan citra yang baik kepada masyarakat bahwa industri futures market atau PBK bisa dipercaya sebagai sarana untuk “*making money*”. Selain meningkatkan citra positif industri PBK kepada masyarakat, Aspebtindo juga memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha PBK untuk memperkenalkan kegiatannya kepada masyarakat.

F Wishnubroto

Ketua Umum Asosiasi
Perdagangan Berjangka
Komoditi Indonesia
(Aspebtindo)



Foto: Bagian KIP

Nah, bagaimana strategi Aspebtindo meraih kepercayaan masyarakat kepada Industri Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai sarana investasi yang aman dan menguntungkan? Simak petikan wawancara Tim Bappebti dengan Ketua Umum Aspebtindo, Fridericus Wishnubroto berikut ini:

Buletin Bappebti: *Bagaimana Aspebtindo menjalankan roda organisasi sehari-hari?*

Wishnubroto : Kegiatan organisasi Aspebtindo saat ini dijalankan oleh 7 (tujuh) orang pengurus yang terdiri dari Ketua Umum, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara dan 4 (empat) orang Wakil Ketua Bidang.

Aspebtindo mempunyai kantor sekretariat di Gedung Graha Mandiri Imam Bonjol Jakarta dimana di kantor tersebut tersedia 4 ruangan yaitu: Ruangan untuk pelatihan, ruang rapat, ruang Direktur Eksekutif dan ruangan staf untuk pendukung.

Kegiatan operasional kantor sekretariat sehari-hari dijalankan oleh Direktur Eksekutif yang sekarang ini dijalankan oleh Bapak **Chrisnawan Triwahyuardhianto** dengan dibantu staf bagian keuangan, administrasi, informasi teknologi dan tenaga kurir serta *office boy*.

Buletin Bappebti: *Sekarang sudah berapa anggota Aspebtindo?*

Wishnubroto : Berdasarkan UU No 10 Tahun 2011 tentang PBK, setiap pihak yang mendapatkan ijin, persetujuan dari Bappebti untuk menjalankan usahanya wajib menjadi anggota asosiasi dalam hal ini Aspebtindo

Dengan demikian saat ini ada kurang lebih 1.537 anggota Aspebtindo yang terdaftar, terdiri enam tipe keanggotaan. Anggota tipe A adalah 2 (dua) perusahaan Bursa Berjangka dan 2 (dua) perusahaan Lembaga Kliring Berjangka. Anggota tipe B adalah 55 perusahaan Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) dan 18 perusahaan Pedagang Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA).

Kemudian ada Anggota tipe C adalah 9 perusahaan Pialang Berjangka non SPA. Pedagang Berjangka non SPA, Penasihat Berjangka dan Pengelola Sentra Dana Berjangka sampai saat ini belum ada anggotanya. Anggota tipe D adalah (perorangan) sebanyak kurang lebih 1.143 Wakil Pialang Berjangka (WPB). Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka sampai saat ini belum ada anggotanya.

Anggota tipe E adalah 7 (tujuh) perusahaan Bank Penyimpan Margin Dana Kompensasi dan Jaminan.

Anggota tipe F adalah pihak-pihak lain yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan saat ini ada 2 (dua) kantor konsultan hukum.

Untuk menjadi anggota Aspebtindo wajib mendaftar dengan mengisi formulir pendaftaran baik yang perorangan maupun perusahaan. Pendaftaran bisa dilakukan secara *online*. Anggota wajib membayar uang pendaftaran dan iuran keanggotaan Aspebtindo. Dengan menjadi anggota Aspebtindo maka mereka bisa mendapatkan pelayanan informasi, sosialisasi dan peningkatan kapabilitas melalui berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh Aspebtindo dengan bekerjasama dengan Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka dan pihak-pihak lain.

Buletin Bappebti: *Untuk anggota kapan mereka bertemu di Aspebtindo?*

Wishnubroto : Anggota wajib bertemu setahun sekali dalam rapat umum anggota tahunan yang diselenggarakan oleh Aspebtindo. Tetapi ada juga pertemuan antar anggota dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan.

Buletin Bappebti: *Bagaimana suka duka pengalaman mengelola anggota memimpin Aspebtindo selama 2 periode menjadi Ketua?*

Wishnubroto : Suka karena bisa memberikan kontribusi dan sumbangsih demi kemajuan industri PBK. Kemudian bisa menjadi pembelajaran bagi saya bagaimana harus menjaga posisi netralitas. Artinya saya harus bisa berlepas diri bahwa saya mewakili satu perusahaan. Saya memimpin asosiasi yang anggotanya terdiri berbagai macam tipe tadi.

Dalam hal ini sebagai ketua Aspebtindo tidak boleh punya *conflict of interest*. Saya harus bisa melepaskan kepentingan perusahaan saya yang juga menjadi anggota Aspebtindo.

Buletin Bappebti: *Siapa mengontrol supaya tidak terjadi conflict of interest tadi?*

Wishnubroto : Di Aspebtindo ada Dewan Pengawas yang mengawasi kinerja pengurus Aspebtindo. Mereka terdiri dari 4 lembaga yang direksinya secara *ex officio* menjadi Dewas yaitu dari BBJ, ICDX, dari PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dan PT Indonesia Clearing House (ICH) serta ditambah 3 orang tokoh di industri perdagangan berjangka. Tokoh-tokoh ini pun merupakan orang yang memiliki pengalaman setidaknya 10 tahun di industri perdagangan berjangka. Mereka dipilih oleh para anggota.

Buletin Bappebti: *Apa saja program utama Aspebtindo?*

Wishnubroto : Periode pertama selama 3 tahun dari 2015 hingga 2018 saya membuat pondasi yang kokoh bagi Aspebtindo. Supaya sebagai organisasi yang masih baru dan bersifat heterogen, Aspebtindo bisa berjalan sesuai AD/ART, dan juga supaya lebih dikenal masyarakat bahwa industri PBK itu ada asosiasinya yaitu Aspebtindo. Selanjutnya adalah membangun citra industri PBK yang positif supaya ke depannya bisa lebih dipercaya oleh masyarakat.

Nah di periode kedua ini, karena fondasinya sudah terbentuk sekarang tinggal organisasi ini fokus pada sosialisasi dan pelatihan. Sosialisasi ditujukan kepada masyarakat luas, dan pelatihan ditujukan untuk anggota terutama para Wakil Pialang. Apalagi Bappebti sekarang ini mengeluarkan peraturan dimana para wakil pialang berjangka wajib mengikuti Program Pelatihan Peningkatan Profesi Wakil Pialang Berjangka (P4WPB).

Program P4WPB ini bertujuan memberikan pelatihan kepada para WPB sebagai ujung tombak perusahaan pialang berjangka dalam melakukan pemasaran, agar bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Bappebti, SRO dan pihak pihak lain yang berkaitan.

Foto: Biro Humas



“Masalahnya adalah belum diterapkannya verifikasi know your customer (KYC). Ini penting supaya tidak timbul suatu permasalahan. Kalau prosedur KYC benar-benar diikuti seperti ketentuan pihak regulator setidaknya akan meminimalkan permasalahan yang ada.”

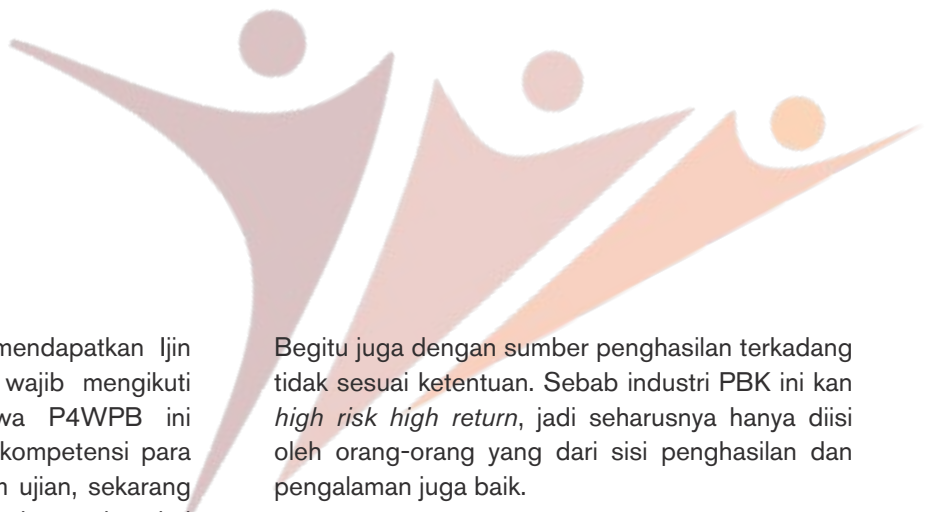
—F WISHNUBROTO

Buletin Bappebti: *Ujian WPB oleh siapa?*

Wishnubroto : Ujian ini diselenggarakan oleh Bappebti. Ujian ini pesertanya wakil wakil dari perusahaan pialang berjangka dan masyarakat umum.

Apabila mereka lulus ujian tertulis dan wawancara maka mereka akan mendapatkan Tanda Lulus Ujian Profesi (TLUP). TLUP ini yang selanjutnya diajukan ke Bappebti oleh mereka yang lulus tersebut untuk mendapat Ijin Wakil Pialang Berjangka.

Sesuai dengan peraturan Bappebti yang baru, TLUP ini berlakunya satu tahun artinya apabila dalam satu tahun tidak diajukan untuk mendapatkan ijin Wakil Pialang Berjangka maka TLUP tersebut tidak berlaku lagi.



Kemudian mereka yang sudah mendapatkan Ijin Wakil Pialang Berjangka maka wajib mengikuti P4WPB. Untuk diketahui bahwa P4WPB ini adalah sebagai pengganti ujian kompetensi para WPB. Kalau dulu melalui program ujian, sekarang berdasarkan masukan Aspebtindo maka hal tersebut telah dirubah. Penyelenggara P4WPB ini terdiri tiga unsur yaitu Bappebti, Bursa Berjangka dan Aspebtindo.

Buletin Bappebti: *Apa saja masalah yang dihadapi Aspebtindo dalam kerangka pembinaan WPB?*

Wishnubroto : Masalahnya adalah belum diterapkannya verifikasi *know your customer* (KYC). Ini penting supaya tidak timbul suatu permasalahan. Kalau prosedur KYC benar-benar diikuti seperti ketentuan pihak regulator setidaknya akan meminimalkan permasalahan yang ada.

Buletin Bappebti: *Kenapa soal KYC sampai sekarang masih jadi masalah?*

Wishnubroto : Sekarang persaingan usaha bagaimana mendapatkan nasabah. Tidak bisa kita pungkiri bahwa ada hal-hal yang sebetulnya harus diterapkan KYC tidak diterapkan. Bagaimana cara mengenal nasabah bagi perusahaan yang berkaitan dengan menghimpun dana masyarakat. Pihak bank, asuransi, dan perusahaan sekuritas di pasar modal juga memperkuat KYC-nya. Kemudian badan pemerintahan lain, seperti PPATK juga menekankan pentingnya soal pengenalan nasabah, kenali siapa nasabah Anda. Sebab kalau ini diabaikan setidaknya bakal muncul masalah dari situ.

Buletin Bappebti: *Apakah memang ada kasus soal KYC yang tidak terverifikasi?*

Wishnubroto : Industri PBK sebenarnya sudah menerapkan soal KYC ini tetapi mungkin ada beberapa hal yang terlewat. Misalnya nasabah yang seharusnya tidak boleh diprospek, contohnya ibu rumah tangga, pensiunan.

Begitu juga dengan sumber penghasilan terkadang tidak sesuai ketentuan. Sebab industri PBK ini kan *high risk high return*, jadi seharusnya hanya diisi oleh orang-orang yang dari sisi penghasilan dan pengalaman juga baik.

Buletin Bappebti: *Apakah banyak nasabah/ investor PBK yang seperti itu?*

Wishnubroto : Sekarang sudah mulai berkurang, tetapi dengan berbagai macam alasan masih ada anggapan bahwa industri PBK ini sifatnya cenderung “merugikan”. Maka makin ke sini investor “rumahan” itu trennya sudah semakin menurun, kasus-kasus keluhan investor juga semakin turun. Maka di sinilah letak pentingnya KYC.

Aspebtindo sudah berupaya sedemikian rupa demikian juga pihak Bappebti selalu menekankan agar Aspebtindo memberikan pembekalan yang memadai kepada calon investor maupun WPB agar betul betul memperhatikan KYC. Makanya dengan program P4WPB itu para WPB mengetahui dan menjalankan fungsinya sebagai wakil pialang dengan baik dan profesional.

Buletin Bappebti: *Bagaimana kondisi mutu SDM PBK khususnya WPB?*

Wishnubroto : Harus diakui kondisi SDM PBK sekarang masih ada yang belum mencapai standar yang diharapkan. Tapi seiring dengan adanya program P4WPB yang kita lakukan maka kita ingin mencapai standar sesuai aturan perundangan. Setidaknya kemampuan SDM industri PBK bisa disejajarkan dengan industri pasar modal.

Buletin Bappebti: *Sebetulnya standar seperti apa yang diharapkan, apakah bisa didapat dari pasar tenaga kerja?*

Wishnubroto : Sekarang ini untuk bisa menjadi WPB syarat pendidikan adalah minimal lulusan D3. Kedepan saya kira untuk mengejar target 4.0 kualifikasinya juga harus meningkat.

Prospek CPO Tahun 2020

Minyak kelapa sawit (*crude palm oil*/CPO) menjadi salah satu komoditi yang banyak dikonsumsi dan diproduksi di dunia. Harganya murah, mudah diproduksi, dan sangat stabil, membuat CPO banyak digunakan untuk berbagai variasi makanan, kosmetik, produk kebersihan, dan juga bisa digunakan sebagai sumber biodiesel atau biofuel. Produksi minyak sawit dunia didominasi oleh Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini secara total menghasilkan sekitar 85-90 persen dari total produksi minyak sawit dunia. Indonesia adalah produsen dan eksportir minyak sawit yang terbesar.

Dalam jangka panjang, permintaan dunia akan minyak sawit menunjukkan kecenderungan meningkat. Ini sejalan dengan jumlah populasi dunia yang terus bertumbuh, dan karenanya meningkatkan konsumsi produk-produk dengan bahan baku minyak sawit. Industri CPO menyilih menjadi salah satu industri kunci untuk perekonomian Indonesia. Ekspor minyak kelapa sawit adalah penghasil devisa yang penting dan industri ini pun memberikan kesempatan kerja bagi jutaan orang Indonesia. Dalam hal pertanian, minyak sawit merupakan industri terpenting di Indonesia yang menyumbang di antara 1,5 hingga 2,5 persen terhadap total produk domestik bruto (PDB).

Berdasar catatan GAPKI atau Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, sejak Januari-Oktober 2019, produksi CPO sebanyak 44,05 juta ton atau tumbuh 11,26 persen dari 39,59 juta ton di periode tahun lalu. Meski meningkat tipis, namun produksi CPO di Oktober 2019 masih sedikit lebih rendah dibandingkan September 2019. Yakni, pada Oktober 2019 produksi CPO sebesar 4,51 juta ton, sementara di September sebesar 4,59 juta ton. Konsumsi minyak sawit dalam negeri dari Januari-Oktober 2019 tercatat tumbuh 34,95 persen menjadi 14,64 juta ton dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 10,85 juta ton. Kenaikan terbesar terjadi pada biodiesel 101 persen, oleofood 15 persen, dan oleochemical 8 persen.

Sementara, volume ekspor minyak sawit pada Januari-Oktober 2019 naik 2 persen dibanding periode yang sama 2018. Kenaikan ekspor terbesar terjadi pada produk Oleokimia yang sebesar 113 persen dan CPO sebesar 17 persen. Kemudian dari sisi tren harga komoditas terutama CPO diperkirakan akan terus membaik dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam maupun luar negeri. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi peningkatan harga CPO adalah penurunan tarif impor CPO India dari Indonesia dari 50 persen menjadi 45 persen.

Harga CPO mulai bergerak naik sejak Desember 2019 sebagai dampak positif pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia sudah menggunakan bahan bakar biodiesel 30 persen mulai Januari 2020. Mandat B30 bahkan bakal terus dinaikkan secara bertahap hingga akhirnya diesel mengandung 100 persen bahan bakar nabati. Dengan meningkatnya permintaan tersebut, Pemerintah Indonesia perlu melakukan *replanting* pohon kelapa sawit tua seluas 2,4 juta hektar untuk meningkatkan produktivitas. Ketua GAPKI Joko Supriyono menyampaikan, produksi minyak sawit dapat meningkat menjadi 60 juta ton pada 2025.

Dari sisi perdagangan berjangka, harga CPO diproyeksi bakal bullish hingga paruh pertama tahun 2020 seiring dengan produksi yang lebih rendah dan mandat penggunaan biodiesel yang lebih tinggi dari produsen utama CPO dunia, Indonesia dan Malaysia. Untuk perdagangan di bursa berjangka Malaysia yang menggunakan jasa CME Globex, harga CPO sempat diperdagangkan di level 2.200 ringgit hingga mencapai 2.400 ringgit atau sekitar 531,21 dolar AS hingga 579,5 dolar AS per ton pada kuartal terakhir tahun 2019. Harga ini memperbaiki lajur pelemahan CPO yang terjadi pada awal tahun itu.

Corona Bikin Harga Komoditas Merana



Jericho Biere

Research & Development
Manager Indonesia
Commodity and Derivatives
Exchange (ICDX)

Baru saja tampak titik terang akan polemik perang dagang antara Amerika dan Cina pada 15 Januari 2020 akan fase pertama dalam kesepakatan perdagangan, dunia digemparkan oleh wabah virus yang berasal dari kota Wuhan, Cina. Wabah virus Corona atau COVID-19 adalah virus menyebabkan radang paru-paru (pneumonia) bagi siapapun yang terjangkit dan ditelaah virus ini berasal dari hewan yang diklasifikasikan sebagai makanan ekstrim seperti kelelawar, sebagai salah satu makanan favorit di Wuhan. World Health Organization (WHO) menetapkan wabah virus Corona sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia pada 30 Januari 2020 lalu.

Kasus terjangkitnya wabah virus Corona kepada manusia sudah tersebar di 29 negara dan semakin meningkat setiap harinya. Tercatat laporan terakhir pada tanggal 19 Februari 2020, kasus terjangkit sebanyak 75,214 kasus, dan 2010 kasus diantaranya sudah wafat, serta 14,623 kasus sudah dinyatakan sembuh.

Disisi lain, wabah virus Corona menyebabkan aktivitas ekonomi di banyak negara terganggu, terutama di negara Cina sendiri. Pada 23 Januari 2020, Presiden Xi Jinping mengumumkan untuk menutup/mengunci akses dari dan ke kota Wuhan yang memiliki 11 juta populasi tersebut.

Di Wuhan dimana terdapat pabrik pembuatan mobil Honda dan Nissan dari Jepang dan beberapa pabrik mobil Eropa. Banyak aktivitas dari pabrik-pabrik ini berhenti berproduksi, karena banyak karyawan tidak bisa kembali ketempat mereka bekerja setelah dari liburan perayaan tahun baru Imlek. Penghentian aktivitas manufaktur di Cina merupakan guncangan besar bagi rantai pasokan (*supply chain*) perusahaan-perusahaan global lintas Asia.

Berdasarkan nilai ekspor kepada daratan Cina dan Hong Kong relatif kepada PDB, Taiwan menjadi negara

yang sangat terpukul atas situasi, di ikuti oleh Vietnam, Malaysia, dan Korea Selatan. Para pemberi kerja di regional ini harus menghadapi keadaan guncangan pasokan karena banyak para pekerja dari Cina yang bekerja di Jepang dan kawasan negara Asia lainnya tidak bisa kembali dari Cina untuk bekerja.

Cina adalah negara importir terbesar untuk komoditas logam dan mineral seperti timah, nikel, bijih besi dan tembaga. Menurut data UN Comtrade, statistik perdagangan internasional, Cina menguasai serapan atas komoditas logam dan mineral tersebut. Tercatat pada tahun 2018 dibandingkan dengan total konsumsi dunia, Cina mengimpor timah sebesar 82 persen, impor nikel sebesar 89 persen, impor bijih besi 75 persen, dan impor tembaga sebesar 63 persen. Besarnya porsi konsumsi komoditas logam dan mineral di Cina menjadikan harga komoditas tersebut sangat berpengaruh atas permintaan dari Cina, sehingga dengan adanya wabah virus di Cina mengakibatkan rantai pasokan terganggu maka permintaan akan komoditas logam dan mineral di Cina di proyeksi akan menurun.

Respon pasar menunjukkan harga-harga komoditas tersebut tertekan pada periode satu bulan di awal tahun 2020, seperti harga timah yang turun 9 persen, harga nikel turun 12 persen, harga bijih besi turun 17 persen, dan harga tembaga turun 13 persen. Selain komoditas logam dan mineral, rantai komoditas minyak mentah ke Cina juga terganggu, dimana Cina juga sebagai importir terbesar untuk minyak mentah. Tercatat harga minyak mentah pada bulan pertama 2020 mengalami penurunan sebesar 21 persen. Analisis memperkirakan harga komoditas logam, mineral dan minyak mentah tersebut masih tertekan untuk sampai pada kuartal kedua tahun ini, tergantung pada usaha percepatan banyak negara terutama Cina dalam mencegah penyebaran virus dan penanggulangan yang terjangkit.

Wajib Lapor Pedagang Aset Kripto

Bappebti Kementerian Perdagangan pada tanggal 31 Desember 2019 mengeluarkan Surat Edaran tentang Penyampaian Laporan Berkala dan Sewaktu-waktu atas Pelaksanaan Perdagangan Aset Kripto.

Seperti diketahui bahwa Kementerian Perdagangan melalui Bappebti telah mengeluarkan kebijakan diperbolehkannya Perdagangan Aset Kripto dalam Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), yakni Peraturan Bappebti nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bappebti nomor 9 tahun 2019, serta Peraturan Bappebti Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nnomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Surat Edaran ini dikeluarkan dengan maksud agar kewajiban untuk menyampaikan laporan Berkala atau Sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan Perdagangan Aset Kripto dapat dilaksanakan dengan baik oleh calon pedagang fisik aset kripto. Ini juga merupakan bagian dari pengawasan yang efektif dan efisien terhadap calon pedagang aset kripto yang dilakukan oleh Bappebti.

Dalam surat edaran ini dijelaskan mengenai jenis laporan dan tata cara pelaporan oleh calon pedagang fisik aset kripto. Beberapa hal penting yang dijelaskan dalam surat edaran ini:

- Calon pedagang aset kripto wajib menyediakan dan/atau membuka akses terhadap seluruh sistem yang digunakan kepada Bappebti dengan hak akses mambaca (*read only*).
- Calon pedagang aset kripto wajib mencantumkan referensi nilai kapitalisasi perdagangan Aset Kripto yang dipergunakan.
- Pelaporan yang disampaikan berupa laporan transaksi harian dan bulanan.
- Laporan disampaikan melalui email: wastran.asetkripto@kemendag.go.id.



- Laporan bulanan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah periode pelaporan berakhir. Jika jatuh pada hari libur, maka batas pelaporan adalah sehari berikutnya.

Dalam surat edaran ini dijelaskan pula bahwa selain pelaporan harian dan bulanan, juga ada laporan triwulan dan tahunan. Untuk laporan keuangan tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik, maksimal 90 hari setelah berakhirnya tahun pelaporan.

Langkah pengawasan ini dilakukan oleh Bappebti dalam rangka memberi kepastian hukum kepada pelaku usaha, serta meningkatkan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi pelanggan aset kripto.

Diharapkan melalui surat edaran ini kewajiban pedagang aset kripto dapat terpenuhi dengan baik demi terselenggaranya perdagangan aset kripto yang lebih lancar.

.....

Mengenai peraturan ini selengkapnya dapat diakses melalui: http://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/edaran_kepala_bappebti/edaran_kepala_bappebti_2020_01_01_llc7gend_id.pdf



CARA AMAN BERTRANSAKSI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

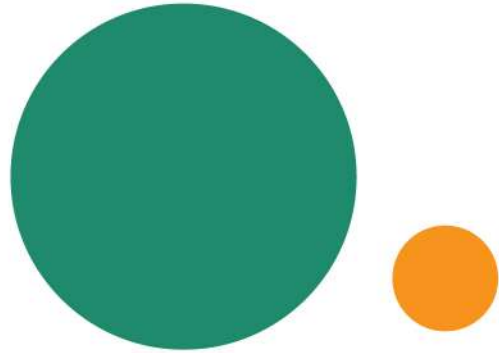
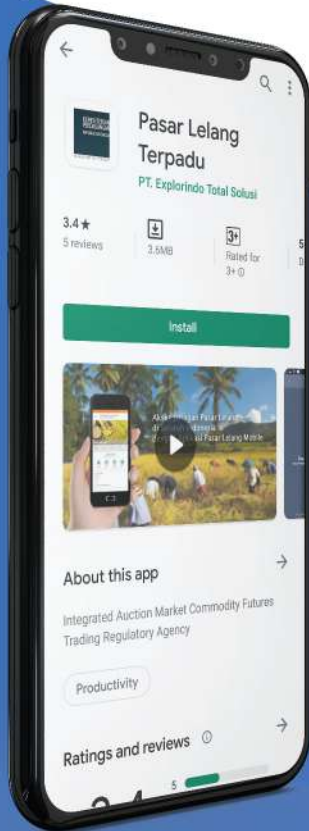
Sebelum melakukan kegiatan di bidang PBK, Investor perlu memahami tata cara bertransaksi dalam kegiatan PBK serta subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan, menguasai teknis-teknik analisis PBK dan investor memahami informasi perkembangan harga.

JADILAH INVESTOR YANG CERDAS

Investor yang ingin menginvestasikan uangnya dalam Perdagangan Berjangka, sekurang-kurangnya harus mengerti atau memahami dasar-dasar analisis pasar yang dipergunakan untuk memperkirakan pergerakan harga di Bursa Berjangka.

APLIKASI

Pasar Lelang Terpadu Google Play



Untuk memudahkan pelaku usaha dalam melakukan transaksi lelang, maka Bappebti telah membangun Aplikasi **Pasar Lelang Terpadu** yang dapat diunduh melalui Google Play.

Melalui Aplikasi **Pasar Lelang Terpadu**, maka penawaran lelang cukup dilakukan dengan menggunakan smartphone berbasis Android.

Download sekarang

